

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang didirikan sekelompok orang yang memiliki intelektual yang luas dalam mempengaruhi masyarakat agar dapat membangun suatu daerah, wilayah bahkan negara agar terciptanya suatu negara yang dapat diatur oleh beberapa orang melalui peraturan yang berlaku. Setiap wilayah negara pasti memiliki prinsip atau peraturan dalam mengatur wilayahnya.

Seperti Arab Saudi menerapkan system monarki yang berbasis kerajaan. Jepang menerapkan system Parlementer. Amerika Serikat menerapkan system demokrasi serta Indonesia menerapkan system demokrasi yang berasaskan pancasila. Partai politik memiliki pengaruh yang kuat serta memberikan dampak kepada masyarakat. Negara yang menganut demokrasi dalam memilih pemimpin suatu wilayah menerapkan system *voting* atau pemilihan suara terbanyak yang dikumpulkan oleh masyarakat. Pemilihan suara yang terbanyak akan menduduki jabatan sebagai Presiden atau Menteri dalam suatu kabinet.

Tentu pemilihan suara sangat berarti bagi suatu partai politik yang mencalonkan kandidat sebagai anggota legislative, eksekutif maupun yudikatif. Dalam anggota partai politik akan mengusulkan kandidat atau calon anggota legislative/eksekutif/yudikatif berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh anggota partainya.

Berbagai macam partai politik memiliki visi dan misi yang berbeda, serta memiliki paradigma yang berbeda dalam membangun suatu wilayah. Indonesia merupakan wilayah memiliki umat muslim terbesar di dunia, memiliki mayoritas 86,7% umat islam berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada bulan Juni 2021, serta sebagiannya menganut

kepercayaan Kristen, Budha, Konghucu dan Hindu. Indonesia memiliki kekayaan alam serta memiliki adat istiadat beragam daerah.

Tentu menjadi suatu kelebihan untuk suatu negara yang memiliki beragam kepercayaan hidup rukun serta berdampingan dengan damai. Akan tetapi menjadi sebuah boomerang pula bagi negara Indonesia karena memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, menjadikan sebuah tantangan bagi negara Indonesia dalam mempertahankan kerukunan umat.

Perekat negara dengan berbagai macam keyakinan disebut bhineka tunggal ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini telah menjadi budaya serta perekat antar umat yang menciptakan toleransi antar umat di wilayah. Indonesia merupakan negara yang mayoritas umat muslim tentu tidak melarang dari berbeda kepercayaan umat beragama. Justru sebaliknya umat muslim selalu menjunjung tinggi toleransi antar umat agar terciptanya rukun beragama. Salah satu partai politik yang mengusung budaya serta prinsip yang islami yaitu partai PKS.

Partai PKS yang didirikan sekelompok para cendekiawan turut andil dan berkontribusi pada negara ini, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat walau mayoritas partai ini didirikan oleh kalangan cendekiawan muslim. Ada banyak organisasi islam yang memberikan kontribusi besar pada negara Indonesia, seperti organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang sector infrastruktur, NU yang berbasis santri, serta salah satunya PKS yang bergerak di bidang politik.

Menurut Databoks Indonesia Corruption Watch (ICW), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 23 orang dan tersebar di delapan partai politik.

Menurut Didik Sugeng Widiarto selaku Peneliti Senior SSC, PKS berada di posisi pertama dengan Perolehan 12,9%. Disusul PDIP dan Demokrat yang masing-masing 10,4% dan 6,9%. Survey itu dilakukan awal Februari ini dengan

melibatkan 1.070 responden yang dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dengan margin of error kurang lebih 3 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, penelitian itu dilaksanakan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Partai PKS juga merupakan partai politik yang memiliki angka yang kecil pada kasus korupsi. Partai dengan kasus korupsi terbanyak yakni PDIP, GOLKAR. Namun pada kenyataannya, partai PKS memiliki suara terendah pada saat pemilihan suara dalam pemilihan anggota baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Padahal idealnya masyarakat seharusnya memiliki pemikiran partai yang memiliki angka korupsi yang kecil, partai itulah yang memiliki potensi yang baik dalam memimpin negeri.

Partai PKS mengusung budaya Islam, serta memilih pendekatan persuasive agamis. Contoh kader DPD PKS giat melakukan kegiatan bakti social, keagamaan seperti melakukan *halaqah* (pengajian), majelis ta'lim, kaderisasi da'i anak-anak hingga dewasa, pendidikan, serta hal-hal yang berbau positif. Masyarakat menanggapi respon positif yang dilakukan oleh anggota DPD PKS. Seharusnya dengan kegiatan yang diadakan tersebut dapat menarik minat dan suara, serta memberikan persamaan persepsi baik dari segi visi dan misi yang diterapkan oleh kepada masyarakat.

Padahal dengan strategi tersebut sangat efektif dengan medan dakwah serta lapangan mayoritas umat muslim. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, elektabilitas komunikasi partai PKS tidak sebesar dengan partai lain terutama partai PDI-P. Dengan melihat fenomena partai politik PKS tersebut, penulis berkeinginan untuk menganalisis komunikasi politik studi kasus DPD PKS Kota Palembang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan komunikasi politik DPD PKS di kota Palembang bahwa:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Komunikasi Politik DPD PKS Kota Palembang
2. Pengaruh Kader Komunikasi Politik DPD PKS Terhadap Masyarakat di Kota Palembang

1.3. Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang serta identifikasi masalah, maka penulis merumuskan:

1. Bagaimana Komunikasi Politik DPD Partai PKS Kota Palembang?
2. Bagaimana Pengaruh Kader Komunikasi Politik DPD PKS Terhadap Masyarakat di Kota Palembang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Komunikasi Politik DPD PKS Kota Palembang.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Kader Komunikasi Politik DPD PKS Terhadap Masyarakat di Kota Palembang

1.5. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, untuk analisis komunikasi partai politik DPD PKS kota Palembang guna dapat dijadikan sebagai referensi politik dan pengetahuan.

b. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi: pertama sebagai masukan DPD PKS Palembang, agar dapat dijadikan sebuah referensi dalam kegiatan berpolitik agar lebih optimal. Kedua, sebagai wawasan bagi seluruh masyarakat agar memahami visi dan misi partai politik PKS.

Agar terhindar dari stigma negative dan *black campaign*, membangun persatuan dan kesatuan antar umat, menjalin hubungan yang kuat antar parpol dengan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi keberlangsungan

dalam membangun negeri. Ketiga, sebagai wawasan pengetahuan dan bahan untuk studi penelitian lebih lanjut.

c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi, sumber informasi serta catatan sejarah dari partai politik PKS di Palembang.

